

MANAJEMEN PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA CADASARI KECAMATAN CADASARI KABUPATEN PANDEGLANG

Management of the Family Hope Program (PKH) Facilitators in Cadasari Village, Cadasari District, Pandeglang Regency

Sanda Sanjaya¹, Sholih², Ahmad Fauzi³

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

sandasanjaya20@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
May 15, 2025	Jun 10, 2025	Jun 22, 2025	Jun 27, 2025

Abstract

This study is motivated by the importance of effective management in the implementation of the Family Hope Program (*Program Keluarga Harapan*, PKH) to achieve its goals optimally, particularly at the grassroots level, such as in Cadasari Village, Cadasari Subdistrict, Pandeglang Regency. The objective of this study is to analyze the implementation of PKH companion management, which includes the stages of planning, execution, evaluation, and the challenges encountered in the mentoring process. A descriptive method with a qualitative approach was used, with data collected through observation, interviews, and documentation. The findings reveal that the management of PKH mentoring in Cadasari Village has been carried out in accordance with the stages of management. In the planning phase, the number of aid recipients was adjusted to the official criteria, although some eligible low-income families were not accommodated due to central government quota limitations. In response, the village government monitored families whose economic conditions had improved for immediate graduation from the program, allowing room for other, more deserving

families to benefit. Program implementation followed procedures set by the central government, with a focus on empowerment and welfare improvement. Regular evaluations were conducted to assess the program's effectiveness, and the results served as a basis for decision-making, including the reallocation of aid to more appropriate beneficiaries. This study demonstrates that structured and adaptive management of PKH mentoring enhances the accuracy of aid distribution and strengthens program governance at the village level.

Keywords: Management; Family Hope Program; Social Facilitator; Program Evaluation; Community Empowerment

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya efektivitas manajemen pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mencapai tujuan program secara optimal, khususnya di tingkat akar rumput seperti di Desa Cadasari, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan manajemen pendamping PKH, yang mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta tantangan yang dihadapi dalam proses pendampingan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pendamping PKH di Desa Cadasari telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan manajemen. Pada tahap perencanaan, jumlah penerima bantuan telah disesuaikan dengan ketentuan, meskipun masih terdapat masyarakat miskin yang layak menerima bantuan namun belum terakomodasi karena keterbatasan kuota dari pusat. Oleh karena itu, pemerintah desa melakukan pemantauan terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ekonominya membaik untuk segera digraduasi, guna memberikan kesempatan bagi keluarga lain yang lebih membutuhkan. Pelaksanaan program dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan berorientasi pada pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas pelaksanaan, dan hasil evaluasi digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, termasuk pengalihan bantuan kepada masyarakat yang lebih layak. Penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pendamping PKH yang terstruktur dan adaptif mampu meningkatkan akurasi penyaluran bantuan dan memperkuat tata kelola program di tingkat desa.

Kata Kunci: Manajemen; Program Keluarga Harapan; Pendamping Sosial; Evaluasi Program; Pemberdayaan Masyarakat

PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan yang masih di hadapi oleh negara Indonesia ini adalah kemiskinan. Kemiskinan menjadi masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional sehingga menjadi prioritas dalam Pembangunan. Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana rendahnya pendapatan seseorang sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Syahdillah & Suriyani, 2023). Selama ini pemerintah Indonesia telah banyak memiliki program-program untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang ada, salah satu strategi yang ditempuh yaitu dengan melindungi keluarga dan kelompok Masyarakat miskin

melalui pemenuhan kebutuhan mereka dari berbagai bidang (Fitri et al., 2022). Nantinya, program pembangunan ini diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Dura dalam (Sukmasari, 2020) menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan biaya kesehatan yang murah serta berkualitas dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten memiliki jumlah penduduk miskin mencapai 814.020 jiwa. Diketahui juga Kabupaten Pandeglang memiliki jumlah masyarakat miskin ekstrem sebanyak 114,65 ribu jiwa. Dari data tersebut diketahui bahwa tidak semua masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik, masih banyak orang-orang yang hidup dengan keterbatasan ekonomi. Menurut (Suprpto, 2020) menjelaskan bahwa kemiskinan berdampak pada pendidikan, kesehatan, kemampuan ekonomi, serta partisipasi masyarakat dalam sebuah negara. Kemiskinan merupakan akar dari permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Pemerintah melakukan berbagai macam program dengan upaya dapat membantu menanggulangi kemiskinan yang ada di Indonesia. salah satu programnya yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan adalah program perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial. Bantuan ini diberikan bagi masyarakat miskin dengan persyaratan tertentu, dimana telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). PKH merupakan bentuk upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia dan secara khusus program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi (Ishak Jaelani et al., 2024).

Program Keluarga Harapan (PKH) di jalankan sebagai amanah dari pelaksanaan UU No.40 Tahun 2004 tentang jaminan sosial nasional, UU No.11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, Inpres No.3 Tahun 2010 tentang rencana tindak percepatan pencapaian sasaran program pro-rakyat dan Perpres No.15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan (Patuang et al., 2024). PKH merupakan bantuan sosial demi mempertahankan kehidupan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan, namun disini lain PKH juga memiliki aspek pemberdayaan yaitu menguatkan rumah tangga miskin agar keluar dari kemiskinan dengan meningkatkan kesehatannya dan mendorong anak untuk bersekolah. Sasaran PKH adalah keluarga sangat miskin dan rentan yang telah terdaftar untuk mengikuti program pendataan kemiskinan terpadu yang mencakup komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial (Syahdillah & Suriyani, 2023).

Sebagai program bantuan sosial bersyarat, PKH bertujuan agar ibu hamil dan anak usia dini dapat mengakses fasilitas/layanan kesehatan (faskes) dan anak usia sekolah dapat memanfaatkan fasilitas/layanan pendidikan (faskes) yang tersedia di sekitarnya. Manfaat PKH yang ada saat ini juga diperuntukkan bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan tujuan untuk mempertahankan kesejahteraan sosial mereka sesuai dengan ketentuan UUD dan Nawacita Presiden Republik Indonesia. Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan bantuan berupa uang tunai, besaran atau nominal bansos PKH ditentukan berdasarkan golongan. Terdapat 7 golongan penerima PKH diantaranya 1). Balita usia 0-6 tahun sebesar Rp.3.000.000 per tahun atau Rp.750.000 setiap tahap 2). Ibu hamil dan masa nifas sebesar Rp.3.000.000 per tahun atau Rp.750.000 setiap tahap 3). Siswa Sekolah Dasar (SD) sebesar Rp.900.000 per tahun atau Rp.225.000 setiap tahap 4). Siswa Menengah Pertama (SMP) sebesar Rp.1.500.000 pertahun atau Rp.375.000 setiap tahap 5). Siswa Menengah Atas (SMA) Rp.2.000.000 pertahun atau Rp.500.000 setiap tahap 6). Lansia berusia 70 tahun keatas sebesar Rp.2.000.000 per tahun atau Rp.500.000 setiap tahap 7). Penyandang disabilitas berat sebesar Rp.2.400.000 per tahun atau Rp.600.000 setiap tahap (Kemensos, 2025).

Berdasarkan ketentuannya, syarat penerima bantuan Program Keluarga Harapan yaitu: 1). Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH sudah terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kementrian Sosial, 2). Memiliki buku tabungan pada bank penyalur dana bantuan sosial PKH, 3). Berasal dari keluarga tidak mampu yang tercatat di desil terbawah data kemiskinan, serta memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) yang terdaftar secara online dan sesuai dengan Dukcapil. 4) Memiliki komponen PKH diantaranya adalah ibu hamil, balita/menyusui, anak sekolah, lansia dan disabilitas, 5). Bukan anggota dari ASN, TNI, atau Polri. Desa Cadasari termasuk kedalam salah satu desa yang menerima bantuan PKH, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di Desa Cadasari Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang bahwa data penerima bantuan PKH ini adalah masyarakat yang masuk ke dalam daftar masyarakat miskin sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), ada sebanyak 370 keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan PKH, yang diantaranya terdiri dari Ibu hamil, anak sekolah, dan orang lanjut usia (Kemensos, 2025).

Program Keluarga Harapan (PKH) yang dijalankan di Desa Cadasari ini sebenarnya menurut hasil observasi awal belum terpenuhi secara maksimal, masih banyak rumah tangga miskin yang mengeluh bahkan merasa iri pada tetangga nya yang menerima program bantuan ini sedangkan namanya tidak masuk dalam data penerima bantuan program bantuan PKH.

Selain itu, masih banyak KPM yang melakukan kesalahan dalam memverifikasi data, sehingga kalau sudah begitu program bantuan tidak akan turun dananya. Berdasarkan latar belakang diatas maka fokus penelitian ini adalah manajemen Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana manajemen pendamping PKH dilaksanakan, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta tantangan yang dihadapi dalam proses pendampingan terutama di di Desa Cadasari Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami secara mendalam bagaimana manajemen pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan di Desa Cadasari. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara menyeluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi yang dilakukan oleh para pendamping dalam menjalankan tugasnya. Subjek dalam penelitian ini dipilih secara purposive, yaitu dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung dalam kegiatan PKH, 1 sekretaris desa dan 2 pendamping PKH. dan beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penelitian ini dilakukan di Desa Cadasari Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang.

Penelitian ini dilakukan selama enam bulan yaitu 7 Maret sampai 26 Agustus 2024. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung di lapangan, dan dokumentasi terhadap data atau laporan kegiatan pendamping PKH. Proses analisis data dilakukan menggunakan teori Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Matthew B Miles, A Michael Huberman, 2020). Untuk memastikan validitas data, digunakan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun triangulasi teknik, agar informasi yang diperoleh lebih akurat dan dapat dipercaya. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang utuh tentang praktik manajemen pendampingan PKH di tingkat desa.

HASIL

Manajemen Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Cadasari Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang sudah berjalan baik sesuai tahapan manajemen yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

1. Perencanaan

Proses perencanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Cadasari, diawali dari Kementerian Sosial yang bertanggung jawab merumuskan kebijakan program, diantaranya menetapkan kriteria keluarga penerima manfaat (KPM), nominal bantuan, serta mekanisme pelaksanaannya. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah memenuhi persyaratan namanya akan terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data ini kemudian akan dikirimkan ke pemerintah daerah untuk dilakukan verifikasi dan validasi. Setelah data di verifikasi dan validasi, selanjutnya dilakukan sosialisasi yang dilakukan oleh pendamping kepada KPM, mengenai tujuan, mekanisme dan kewajiban KPM sebagai penerima bantuan program PKH. Adapun tahap akhir dari proses perencanaan ini, dengan pembuatan buku rekening bagi KPM sebagai sarana penyaluran bantuan PKH.

Untuk mendapatkan informasi lebih mendalam mengenai persiapan perencanaan program bantuan, peneliti melakukan wawancara dan observasi. H selaku Pendamping Sosial mengatakan tentang pendataan masyarakat penerima bantuan " *Pendataan dilakukan melalui aplikasi dan melihat apakah KPM layak menerima bantuan dengan home visit menanyakan penghasilan, melihat kondisi rumah, nanti kan kita serahkan datanya ke pusat apakah layak atau tidak, kalau layak namanya terdaftar di DTKS*". Dari pernyataan tersebut, jadi desa ini hanya membantu masyarakat untuk mendapatkan bantuan PKH, dengan berusaha mendaftarkan mereka tetapi yang memutuskan pihak pusat. Berikut gambaran terkait pendaftaran yang dilakukan oleh Desa ketika memanggil masyarakat yang terdaftar atau yang berhak menerima:



Gambar 1. Tahapan Awal Pendaftaran, Penerimaan dan Pendataan.

Dari gambar 1 diatas terlihat masyarakat antusias ketika melakukan pendaftaran dan pendataan oleh pemerintah desa. Hal ini menunjukkan bahwa mereka senang mendapatkan bantuan. Setelah proses pendataan, dilakukan sosialisasi. Sosialisasi PKH bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada Calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengenai maksud, tujuan, kriteria penerima, hak dan kewajiban serta mekanisme pelaksanaan PKH. Sosialisasi dilakukan secara tatap muka langsung yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait seperti Calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM), pendamping sosial, perangkat desa, perwakilan Dinas Sosial, serta tokoh masyarakat. Setelah proses pendataan dan sosialisasi, tahap selanjutnya yaitu pembuatan buku rekening bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Di Desa Cadasari, pembuatan rekening dilakukan oleh Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai salah satu bank penyalur yang ditunjuk oleh Kementrian Sosial. Proses pembuatan buku rekening dimulai dari penetapan daftar KPM yang data dirinya telah terverifikasi dan tervalidasi melalui Data Kesejahteraan Sosial (DTKS). Nantinya pendamping sosial akan memberitahukan kepada KPM terkait jadwal dan lokasi pembuatan rekening. Adapun persyaratan yang harus di bawa KPM dalam pembuatan rekening ini seperti diwajibkan membawa identitas diri Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Seperti yang dinyatakan oleh H (43) "*Harus mempersiapkan KTP dan KK.*"

2. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu suatu rangkaian proses pencairan atau penyaluran bantuan. Dalam hal ini, KPM akan mendapatkan informasi mengenai pencairan dana bantuan melalui pendamping PKH. Pencairan ini biasanya dilakukan per 3 bulan sekali selama 1 tahun. Seperti yang disampaikan oleh Responden 1 H (43) mengatakan *“Pertiga bulan sekali dan terkadang tidak sesuai dengan jadwal, terkadang cepat atau lambat penyalurannya. Dalam satu tahun KPM menerima 4 kali bantuan selama 1 tahun”*. Besaran atau nominal bansos PKH ditentukan berdasarkan komponen jadinya tiap tiap komponen penerima bantuan PKH ini, berbeda beda nominal uang yang didapatkannya. Seperti yang disampaikan oleh Responden 1 H (43) mengatakan *“Bantuan yang didapatkan yaitu uang tunai yang dibedakan setiap komponen penerimanya. Komponen 1 akan lebih kecil mendapatkan bantuannya”*.

Proses penyaluran/pelaksanaan Dilakukan di Kecamatan Cadasari, KPM akan datang langsung ke Kecamatan Cadasari yang dikoordinir langsung oleh pendamping PKH Desa Cadasari. Pihak Bank Himbara biasanya yang bertanggung jawab selama proses penyaluran dana bantuan ini, tetapi sejak tahun 2022 proses pencairan bantuan PKH mengalami perubahan, sehingga yang bertanggung jawab dalam proses pencairan yaitu PT. POS Indonesia seperti yang disampaikan oleh H (52) *“Awalnya penyaluran bantuan PKH ini melalui Bank Himbara, tetapi sejak tahun 2022 Melalui kantor POS dengan mendatangi langsung ke kantor desa untuk membagikan bantuan kepada KPM dengan diberikan barcode”*. Berikut contohnya:



Gambar 2. Penerimaan Bantuan Bansos PKH

Dari gambar 2 diatas diperlihatkan bahwa salah satu masyarakat desa menerima bantuan bansos PKH yang kemudian didampingi oleh tokoh masyarakat setempat baik itu

dari pendamping desa terkait PKH, TNI dan POLRI. Semua ini bertujuan agar pemanfaatan dan penyaluran PKH tersalurkan dan berjalan dengan baik serta sesuai dengan tujuannya.

3. Evaluasi

Proses evaluasi program ditandai dengan menilai apakah program tersebut sudah berjalan efektif, efisien dan sesuai dengan tujuan. Adapun aspek-aspek dalam proses evaluasi program PKH yaitu ketepatan sasaran program, ketepatan waktu pencairan, dampak program terhadap KPM. Seperti yang dikatakan Responden 3 A (40) *“Untuk sejauh ini belum tepat sasaran yaa, masih banyak yang sangat layak menerima program bantuan ini tapi tidak dapat”*. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merupakan keluarga miskin yang membutuhkan bantuan yang namanya telah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Adapun jumlah penerima bantuan PKH ini dari pusat kuotanya terbatas, artinya jika kuota penerima PKH ini di suatu daerah sudah terpenuhi, maka keluarga lainnya harus menunggu hingga ada penambahan kuota atau terjadi pergantian KPM misalnya ada yang lulus graduasi/mundur.

Proses pencairan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Cadasari telah berjalan lancar tanpa ada kendala di dalamnya. KPM dapat mencairkan dana bantuannya sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh PT POS Indoneisa dengan menggunakan bercode. Proses pencairan dilakukan langsung oleh KPM yang bersangkutan, dengan membawa dokumen yang diperlukan, adapun sebagai pendamping PKH ikut turut mendampingi KPM dalam proses pencairan ini. Seperti yang dikatakan oleh Responden 2 H (52) *“Pencairan sudah tepat waktu”*. Dalam setahun, bantuan PKH di Desa Cadasari ini sudah terjadwal per 3 bulan sekali artinya dalam 1 Tahun dapat 4x.

PEMBAHASAN

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program perlindungan sosial bersyarat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, khususnya kelompok rentan seperti ibu hamil, anak usia dini, pelajar, penyandang disabilitas, dan lansia (Luthfi, 2019). Dalam pelaksanaannya, keberadaan pendamping PKH memegang peran yang sangat penting sebagai penghubung antara pemerintah dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Manajemen pendamping PKH mencakup fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi terhadap proses pendampingan dan penyaluran bantuan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Cadasari, pelaksanaan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dikatakan berjalan dengan baik sesuai

dengan tahapan suatu program yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Hal ini sejalan dengan pendapat yang disampaikan G.R Terry dalam (Salehah, 2020) menjelaskan manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya. Dan hal ini juga didukung oleh penelitian (Jazuli et al., 2023) bahwa dalam suatu program agar berjalan lancar dan berkemajuan maka ada tiga proses yang wajib dilakukan yaitu perencanaan yang jelas, pelaksanaan yang terstruktur dan evaluasi yang mengedepankan perubahan dan kemajuan.

Proses perencanaan merupakan tahapan awal dari kegiatan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Menurut Robbins dan Coulter dalam (Dewi, 2021) mendefinisikan perencanaan sebagai sebuah proses yang ditandai dengan menetapkan tujuan yang ingin dicapai, menentukan strategi pencapaian tujuan secara menyeluruh serta merumuskan system perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan hingga tercapainya tujuan. Tahapan ini dimulai dari pemerintah pusat yaitu Kementerian Sosial melakukan identifikasi masalah sosial terkait kemiskinan dan kesenjangan akses mengenai layanan Pendidikan, Kesehatan dan kesejahteraan sosial. Adapun Langkah awal ini seperti menetapkan kriteria manfaat yang disesuaikan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Menyusun alokasi anggaran, serta menunjuk Lembaga pelaksana dan pendamping sosial PKH. Selain itu kegiatan sosialisasi terkait bantuan PKH juga diberikan oleh pendamping dan selanjutnya KPM akan membuat buku rekening yang akan digunakan sebagai alat untuk menerima program bantuannya, berupa dana bantuan yang besarnya disesuaikan dari komponen PKH.

Menurut Abdullah Syukur mendefinisikan pelaksanaan sebagai sebuah aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk dapat melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan secara bersama dan sesuai musyawarah (Rusdiana & Nasihudin, 2019). Pelaksanaan/penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukan sebanyak 4 kali sepanjang tahun yaitu setiap triwulan Hal ini bertujuan agar KPM dapat memanfaatkan bantuan secara berkelanjutan dan tidak habis dalam waktu singkat. Adapun besaran dana penerima bantuan PKH disesuaikan berdasarkan komponen PKH seperti ibu hamil, balita, anak sekolah, penyandang disabilitas, dan lansia.

Menurut Davies dalam (Anwar, 2021) evaluasi merupakan suatu proses sederhana yang memberikan atau menetapkan suatu nilai terhadap tujuan, kegiatan, Keputusan, untuk

kerja, proses, orang, objek dan masih banyak yang lain. Desa Cadasari Kecamatan Cadasari biasanya melakukan kegiatan evaluasi per 6 bulan sekali artinya dalam satu tahun dilakukan 2 kali evaluasi, hal ini dilakukan agar kekurangan atau kendala dalam proses penyaluran bantuan bisa diperbaiki agar tidak terjadi lagi kekurangan atau kendala pada proses penyaluran berikutnya.

Selain itu, evaluasi manajemen juga melibatkan monitoring capaian target dan dampak sosial. Meskipun dari sisi teknis proses pencairan dinilai tepat waktu dan lancar, aspek keberlanjutan dan ketepatan sasaran masih menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, manajemen pendamping di Desa Cadasari perlu melakukan evaluasi berkala secara kolaboratif bersama stakeholder desa, agar kualitas layanan program PKH semakin meningkat dan tepat guna. Hal ini penting karena salah satu faktor keberhasilan suatu program termasuk manajemen pelaksanaan pendampingan PKH adalah koordinasi dan juga searah tujuan yang sama, sehingga dalam pelaksanaan semuanya mengetahui peran dan juga pemirikan yang ada terkait program tersebut (Emiliasari & Kosmajadi, 2020).

Manajemen pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Cadasari Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang memberikan sejumlah dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Salah satu dampak utamanya adalah meningkatnya kesadaran keluarga terhadap pentingnya pendidikan dan kesehatan. Melalui kegiatan pertemuan P2K2 yang rutin dilaksanakan oleh pendamping, KPM mendapatkan pengetahuan praktis mengenai pengasuhan anak, manajemen keuangan keluarga, serta akses layanan sosial dan kesehatan. Hal ini berdampak pada peningkatan partisipasi anak dalam pendidikan formal dan kunjungan ke fasilitas kesehatan. Penelitian oleh (Utami et al., 2020) menunjukkan bahwa kehadiran pendamping PKH berkontribusi secara langsung dalam mengubah perilaku KPM menuju pola hidup yang lebih mandiri dan produktif, terutama dalam hal pengelolaan bantuan dan penggunaan dana secara bijak. Bahkan di dalam penelitian (Rachmayuniawati, 2019) kontribusi pendamping PKH terutama terhadap masyarakat tingkat bahwa mampu mencapai 91%, artinya memiliki kemamfaatan yang maksimal.

Selain itu, peran pendamping dalam memfasilitasi pemutakhiran data dan proses pencairan yang tepat waktu membantu menurunkan tingkat kecemasan dan kebingungan di kalangan KPM. Dampak lainnya adalah terbentuknya jaringan komunikasi antara KPM, pendamping, dan perangkat desa yang mempermudah penanganan masalah sosial secara

kolektif. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Harmonis & Malik, 2024), keberadaan pendamping yang aktif dan terorganisasi dengan baik dapat meningkatkan efektivitas distribusi bantuan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah. Oleh karena itu, manajemen pendamping yang baik tidak hanya berdampak pada efisiensi pelaksanaan program, tetapi juga pada transformasi sosial dan pemberdayaan masyarakat miskin secara berkelanjutan (Setyawati & Woelandari P.G, 2019). Sehingga dari sini dapat dipahami bahwa manajemen pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Cadasari telah berjalan dengan sistematis melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang melibatkan pendamping, pemerintah desa, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan memberikan dampak yang positif. Pendamping berperan penting dalam memberikan edukasi kepada KPM, memastikan bantuan diterima tepat waktu, serta mendampingi proses administrasi dan pencairan dana. Meskipun, masih terdapat tantangan dalam hal ketepatan sasaran penerima, mengingat masih ada keluarga miskin yang belum terakomodasi karena keterbatasan kuota sehingga membuat pemerintah desa untuk melakukan evaluasi dan permintaan kepada pemerintah pusat untuk menambah kuota.

Secara keseluruhan, manajemen pendamping memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesadaran KPM terhadap pendidikan, kesehatan, dan kemandirian keluarga. Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting dalam pengembangan kualitas pendampingan program bantuan sosial di tingkat desa. Pertama, dibutuhkan penguatan kapasitas pendamping melalui pelatihan berkelanjutan agar mereka mampu memberikan layanan yang lebih responsif dan berbasis data. Kedua, perlu adanya integrasi dan kolaborasi lebih erat antara pendamping, pemerintah desa, dan dinas sosial untuk memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan. Ketiga, sistem evaluasi berbasis masyarakat perlu diterapkan untuk mengukur dampak nyata dari pendampingan terhadap perubahan perilaku dan kesejahteraan KPM. Dengan manajemen pendamping yang semakin baik, program PKH diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Manajemen Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Cadasari Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang sudah berjalan baik sesuai tahapan manajemen yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. pada tahap perencanaan jumlah penerima program bantuan sudah sesuai dengan yang direncanakan. Akan tetapi masih banyak masyarakat

miskin kategori layak menerima bantuan tetapi belum dapat bantuan karena jumlah kuotanya terbatas dari pusat. Maka dari itu, pemerintah Desa melakukan pemantauan mengenai KPM yang ekonominya sudah mulai membaik agar segera dilakukan graduasi untuk memberi kesempatan kepada masyarakat miskin lain agar bisa merasakan program bantuan PKH ini. Pelaksanaan program dilakukan berdasarkan sesuai prosedur pusat dan selalu mengutamakan tujuan agar nantinya memberikan mamfaat yang maksimal. Sedangkan evaluasi telah dilakukan berkala untuk menilai efektivitas program, sehingga penemuan-penemuan yang tidak sesuai akan dilakukan pengalihan termasuk masyarakat yang sudah bisa dikatakan membaik untuk diajukan perpindahan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan. Bahkan sekali-kali pemerintah desa berkoordinasi dengan pemerintah Kota agar mampu menambah kuota agar masyarakat desa yang membutuhkan dapat menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Penelitian ini memberikan kontribusi empiris dalam memahami secara konkret bagaimana praktik manajemen pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) berlangsung di tingkat desa. Melalui pendekatan kualitatif yang berbasis pada realitas di lapangan, penelitian ini mengungkap dinamika kerja pendamping PKH, mulai dari proses perencanaan kegiatan, pelaksanaan pendampingan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), hingga mekanisme evaluasi dan pelaporan. Temuan ini memberikan gambaran faktual mengenai tantangan yang dihadapi pendamping, seperti kendala komunikasi, keterbatasan sumber daya, serta koordinasi lintas sektor yang belum optimal. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan sbagi pemangku kebijakan dan pelaksana program dalam merancang strategi penguatan kapasitas pendamping, memperbaiki sistem pelaksanaan program sosial, serta mendorong peningkatan efektivitas pelaksanaan PKH di daerah lain dengan karakteristik serupa.

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya guna memperluas dan memperdalam kajian yang telah dilakukan. 1) Penelitian selanjutnya disarankan untuk fokus pada analisis efektivitas program PKH dari sisi penerima manfaat (KPM), agar dapat diketahui sejauh mana dampak nyata program ini terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi keluarga miskin. 2) Selain itu, disarankan juga dilakukan penelitian komparatif antara desa yang satu dengan desa lainnya dalam hal pelaksanaan dan manajemen pendampingan PKH, untuk mengetahui faktor-faktor kunci keberhasilan dan hambatan yang bersifat lokal maupun sistemik, sehingga dapat menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih adaptif dan berbasis konteks.

Ucapan terimakasih kepada beberapa pihak yang telah membantu, memotivasi dan dukungan dari berbagai pihak, terutama kepada: 1) Kepala desa, sekertaris desa dan pendamping PKH di Desa Cadasari yang telah membantu dan memberikan izin untuk melakukan penelitian ini. 2) Bapak Dr.H.Sholih ,M.Pd dan Bapak Ahmad Fauzi, M.Pd selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dalam menyelesaikan penelitian ini. 3) Kedua orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan dan doa dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, K. (2021). Urgensi Evaluasi Dalam Proses Pembelajaran. *Rausyan Fikir: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, 17(1), 69. <https://doi.org/10.31000/rf.v17i1.4183>
- Dewi, N. N. (2021). *Pengantar Manajemen*. Scopindo Media Pustaka.
- Emiliasari, R. N., & Kosmajadi, E. (2020). Pendampingan Penerapan Manajemen Pemasaran Produk Home Industri Desa Cikadu. *Jurnal Parahita Adminas*, 1(2), 78. <https://www.ejournal.unma.ac.id/index.php/parahita/article/view/387>
- Fitri, R. E., Setiawan, E., Usman, M., & Aziz, D. (2022). Analisis Regresi Logistik Biner Terhadap Data Indeks Kedalaman Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2020. *Jurnal Siger Matematika*, 3(2), 95. <https://jurnal.fmipa.unila.ac.id/JSM/article/view/3117>
- Harmonis, I. R., & Malik, A. (2024). Peran Pendamping PKH Dalam Upaya Mencapai SDG's Di Kecamatan Kaliwungu Selatan. *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 2(3), 107–124. <https://doi.org/10.61579/future.v2i3.101>
- Ishak Jaelani, M., Ahmad Sipa, A., Aprilyani S, L., & Adi Saputra, R. (2024). Penerapan Logika Fuzzy Tahani Dalam Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kelurahan Kessilampe. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 8(3), 2518–2524. <https://doi.org/10.36040/jati.v8i3.8877>
- Jazuli, A., Salsabila, A. Y., Assidiqi, A. H., & Sadiyah, D. (2023). The Strategy of the Head of Madrasah in Cultivating Fastabiqul Khoirot Culture in the State High School Environment in Batu City. *EDHJ Unnusa*, 8(April), 56–65. <https://journal2.unusa.ac.id/index.php/EHDJ/article/view/4849>
- Kemensos, T. (2025). *Program Keluarga Harapan*. Kemensos.Go.Id. <https://kemensos.go.id/program-bantuan-sosial/pkh>
- Luthfi, M. (2019). Efektifitas Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus di Desa Margajaya Kecamatan Ngamprah KBB). *Comm-Edu (Community Education Journal)*, 2(1), 81. <https://doi.org/10.22460/comm-edu.v2i1.2442>
- Matthew B Miles, A Michael Huberman, J. S. (2020). *Qualitative Data Analysis (A Methods Sourcebook)* (Helen Salmon (ed.)). SAGE Publications.
- Patuang, W., Ahri, R. A., & Arman, A. (2024). Implementasi UUD No. 40 Tahun 2004 Tentang Pengajuan Klaim Rawat Inap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

- Kesehatan di Rumah Sakit Umum Andi Djemma Masamba. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 187. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/7771>
- Rachmayuniawati, Y. (2019). Pengaruh Kecerdasan Sosial, Motivasi Kerja, Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pekerja Sosial Pendamping Pkh Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Ekonomi Manajemen*, 4(2), 128–133. <https://doi.org/10.37058/jem.v4i2.702>
- Rusdiana, A., & Nasihudin. (2019). *Kesiapan Manajemen Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi*. Pusat Penelitian Dan Penerbitan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Salehah, A. (2020). *Manajemen Kearsipan Dalam Ketatausahaan Di Min 3 Pringsewu* [Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung]. <https://repository.radenintan.ac.id/12174/>
- Setyawati, N. W., & Woelandari P.G, D. S. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendampingan Program Kerja Berbasis Manajemen Lingkungan. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 3(2), 73. <https://doi.org/10.31764/jmm.v0i0.1080>
- Sukmasari, D. (2020). Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif AL-Qur'an. *Jurnal Attibyan: Jurnal Of Qur'an and Hadies Studies*, 3(1), 16. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/tibyan/issue/view/374>
- Suprpto, B. (2020). *Model Sistem dan Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) Pada Sistem Pendukung Keputusan*. ZT Corpora.
- Syahdillah, A., & Suriyani. (2023). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Pendidikan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Wirang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong. *JAPB: Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik*, 6(1), 92–102. <https://www.jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB/article/view/740>
- Utami, I. P., Rangga, K. K., Yanfika, H., & Mutolib, A. (2020). Kinerja Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kota Bandar Lampung. *JSHP : Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 5(1), 45. <https://doi.org/10.32487/jshp.v5i1.901>